

**PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR OLEH YONIF
RAIDER 303/SSM GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN WILAYAH DI
KABUPATEN GARUT**

**THE TACKLING OF FLOOD DISASTER AND SOIL EROSION BY YONIF RAIDER
303/SSM FOR CREATING A REGION TENACITY IN GARUT REGENCY**

Arief Widyanto¹, Yuli Subiakto², Resmanto Widodo Putro³

Program Studi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan

(arief.taipur@gmail.com; y.subiakto09@gmail.com; pusbangdik.lp3@gmail.com)

Abstrak -- Yonif Raider 303/SSM merupakan salah satu satuan terdepan di jajaran TNI AD yang selalu siap siaga untuk menciptakan keamanan dan ketahanan wilayah di Kabupaten Garut, salah satunya melalui penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor dimana Kabupaten Garut merupakan daerah berpotensi rawan bencana peringkat ke dua di Indonesia. Penelitian ini berupaya menjawab dan menganalisis bagaimana kendala serta upaya peningkatan kemampuan Yonif Raider 303/SSM dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi yaitu tidak jelasnya kerangka kerja dalam evakuasi bagi prajurit, kurangnya alat kebencanaan dan koordinasi, sedangkan upaya peningkatan kemampuan Yonif Raider 303/SSM dilakukan melalui Binter Satuan Non Kowil dalam hal pencarian dan penyelamatan korban bencana alam pada tahap tanggap darurat. Saran yang diberikan adalah perlu adanya Revitalisasi kerjasama dalam penanggulangan bencana diantara Yonif Raider 303/SSM dan Pemda Garut yang jelas. Penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Garut perlu melibatkan Yonif Raider 303/SSM guna mewujudkan ketahanan wilayah.

Kata kunci: Penanggulangan Banjir, Tanah Longsor, Ketahanan Wilayah

Abstrak -- Yonif Raider 303/SSM is one of the leading units in the ranks of the Army that is always on standby to create regional security and resilience in Garut Regency, one of which is through flood and landslide disaster mitigation where Garut Regency is ranked second in Indonesia. It seeks to answer and analyze the obstacles and efforts to improve the capacity of Yonif Raider 303/SSM in managing floods and landslides in Garut Regency. The research method used is qualitative methods with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of the study explained that the obstacles faced were the lack of clarity in the framework for evacuation for soldiers, the lack of disaster and coordination tools, while efforts to increase the capacity of Yonaid Raider 303/SSM capabilities were carried out through the Intervention of Non Kowil Units in the

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan dan bertugas pada satuan Yonif Raider 303/SSM sebagai Wadanyonif Raider 303/SSM

² Dosen Universitas Pertahanan sebagai dosen pembimbing 1

³ Dosen Universitas Pertahanan sebagai dosen pembimbing 2

search for and rescue of victims of natural disasters during the emergency response phase . The advice given is the need for revitalization of cooperation in disaster management between Yonif Raider 303/SSM and the Garut Regional Government clearly. Disaster mitigation for floods and landslides in Garut Regency needs to involve Yonaid Raider 303 / SSM to realize regional resilience.

Keywords: Flood Mitigation, Landslide, Region Resilience

Pendahuluan

Bencana Alam selama ini selalu dipandang sebagai *force majeure* yaitu sesuatu yang berada di luar kontrol manusia, bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir dan longsor. Kabupaten Garut berada di posisi dua sebagai kabupaten/kota yang rawan bencana alam di Indonesia.⁴ Informasi ini diperkuat dengan data yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

Tabel 1.1. Bencana Alam Kab/Kota (Garut)
Tahun 2010 S/D 2018

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (jiwa)		
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & Mengungsi
101 Banjir	59	71	24	31,722
102 Tanah longsor	92	38	27	8,694

Sumber: <https://bnpb.go.id>

⁴ <https://news.detik.com>, pada 23 Mei 2018

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor bencana alam diakibatkan rusaknya kawasan hutan, disamping faktor lain juga yang mempengaruhi seperti tingginya curah hujan.⁵ Bencana banjir bandang yang menerjang tujuh kecamatan di Kabupaten Garut Jawa Barat pada tahun 2016 lalu yang merupakan bencana banjir bandang terbesar dan terparah ini menelan banyak korban jiwa, merusak sekitar 594 bangunan terdiri dari sekolah, asrama TNI rumah sakit, pemukiman, PDAM dan menghancurkan 57 bangunan lainnya.⁶ Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Garut mengatakan Banjir Bandang sering terjadi sampai saat ini, namun intensitasnya besar dan kecil. Yang besar terjadi 2011 di Pamengpek, kemudian 2014 Cikajang dan

⁵ Doni Ikbal, "Memperhatikan ... Ternyata ini penyebab banjir bandang Garut" dalam <http://www.mongabay.co.id/2016/09/23/memprihatinkan-ternyata-ini-penyebab-banjir-bandang-garut/>, diakses pada 23 Mei 2018

⁶ Yani Sumiana, "Kajian Banjir Bandang Kabupaten Garut", dalam <https://yanisumiana.wordpress.com/2017/03/29/kajian-banjir-bandang-kabupaten-garut/>, diakses pada 24 Mei 2018.

yang terakhir 2016 di Ciamanuk. Sejak tahun 2000 hingga 2017 telah terjadi banjir sebanyak 49 kejadian. Pada tahun 2005 kejadian banjir di Kabupaten Garut semakin meningkat mengikuti laju perubahan penggunaan lahan. Peningkatan yang signifikan yaitu di tahun-tahun 2010-2011 dan tahun 2016-2017, hingga 11 kali kejadian banjir.

Selain bencana alam banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut yaitu rawan longsor hal tersebut terjadi karena adanya Alih guna lahan, Sepuluh tahun terakhir telah terjadi alih fungsi lahan yang tidak terkontrol dan menambah luas ruang terbuka. Akibat dari alih fungsi lahan di Kabupaten Garut sering terjadi longsor diantaranya pada tahun 2017 yaitu di Kecamatan Cisewu, Banjarwangi dan Pasirwangi yang menyebabkan badan jalan di daerah tersebut tertutup bahkan mengancam beberapa rumah terkena dampak longor, kemudian di Desa Wangunjaya yang menyebabkan akses jalan utama tidak dapat dilintasi kendaraan roda empat. Longsor-longsor yang terjadi di Kabupaten Garut tersebut diakibatkan oleh

Penanggulangan bencana alam merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana

sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi dengan tanggapan darurat (emergency respon). Keterlibatan Yonif Raider 303/SSM sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2) bahwa TNI termasuk didalamnya TNI AD mempunyai tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP).⁷ Salah satunya membantu penanggulangan bencana alam, pengungsian dan pembersihan bantuan kemanusiaan. Dimana Yonif Raider 303/SSM merupakan salah satu satuan terdepan di jajaran TNI AD yang selalu siap siaga untuk menciptakan keamanan di wilayah Kabupaten Garut. Namun pada kenyataan keterpaduan dilapangan peran Yonif Raider 303/SSM dengan pemerintah daerah setempat dalam penanggulangan bencana alam masih belum maksimal dan optimal baik dalam sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Garut.

Dari permasalahan yang ada pada pelaksanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Garut yang di rasa

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7 ayat (2).

masih belum efektif karena Pelibatan/kekuatan TNI yang diluar dari tugas pokok akan mengundang beberapa tanggapan dari berbagai LSM, yang menyampaikan hal tersebut harus ada dasar keputusan politik, tidak bisa atas dasar keputusan dari satuan itu sendiri. Pada pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan sering terjadi perbedaan dalam pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana alam antara Yonif Raider 303/SSM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, dimana peraturan pemerintah tidak sinkron dengan Perkasad No 96/XI/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Alam di darat yang dijadikan pedoman oleh Yonif Raider 303/SSM.

Kendala lain yang terjadi yaitu masih ditemukannya berbagai kelemahan dan kekurangan prajurit Yonif Raider 303/SSM dalam perbantuan Bencana alam di Kabupaten Garut seperti kemampuan SAR, pertolongan pertama pada korban, kurangnya logistik sarana pencarian korban dan pembersihan (LCR, pelampung, alat pembersih puing-puing maupun lumpur), kurangnya perlengkapan obat-obatan dan perlengkapan kesehatan serta tenaga medis yang terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan suatu SOP/MOU yang jelas

untuk melegalkan kegiatan pergerakan pasukan Yonif Raider 303/SSM dalam rangka pembantuan penanggulangan bencana alam kepada Pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya kerjasama antara Yonif Raider 303/SSM dengan instansi pemerintahan terkait seperti BPBD dalam kegiatan mitigasi baik melalui penyuluhan atau sosialisasi pada saat pra bencana/sebelum bencana serta pada tahap rekontruksi, hasil yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah akan lebih efektif dalam rangka menanggulangi bencana alam yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana faktor-faktor serta upaya Yonif Raider 303/SSM dalam penanggulangan banjir dan tanah longsor guna mewujudkan ketahanan wilayah di Kabupaten Garut.

Dalam membahas fenomena ini, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori penanggulangan bencana terpadu sebagai mata pisau analisis dalam membedah segala permasalahan yang terkandung di dalamnya., dengan teori penunjang manajemen penanggulangan bencana, konsep ketahanan wilayah dan konsep Satuan Non Kowil.

Dalam bukunya Sumber Daya Air Terpadu Edisi Revisi, Kodoatie dan Sjarif (2008) berpendapat bahwa pengelolaan bencana terpadu merupakan penanganan integral yang mengarahkan semua *stakeholders* spesifik pengelolaan bencana terpadu (khususnya yang terkait dengan daya rusak air) di definisikan sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan bencana serta pengelolaan aspek lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengoptimalkan resultan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial khususnya dalam kenyamanan dan keamanan terhadap bencana dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kesetabilan dari ekosistem-ekosistem penting.⁸

Pengelolaan bencana terpadu dikelompokkan dalam tiga elemen penting, yaitu: *the enabling environment*, peran-peran institusi (*institutional role*), dan alat-alat manajemen (*management instrument*).

1) *Enabling Environment*

Enabling Environment diterjemahkan sebagai suatu pengkoordinasian yang

mungkin terjadi. Dalam hal pengelolaan bencana maka pengertiannya adalah hal-hal utama atau substansi-substansi pokok yang membuat pengelolaan dilakukan dengan cara-cara, strategi dan langkah-langkah ideal yang tepat sehingga tercapai tujuan pengelolaan bencana yang optimal. Menurut *Global Water Partnership* (2001) terdapat tugal hal substansi/prinsip dalam pengkondisian itu, yaitu: kebijakan, kerangka kerja legislatif, dan finansial.

2) Peran Institusi

Seperti sudah disebutkan bahwa pengelolaan bencana adalah kompleks dan saling ketergantungannya sangat tinggi, maka dalam kelembagaan perlu dibuat organisasi lintas batas, baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten kota.

3) Alat-alat Manajemen atau Instrumen-instrumen pengelola

Kodoatie dan Sjarif mengelompokkan Instrumen-instrumen pengelola bencana meliputi: 1. analisis penilaian bencana, 2. perancangan dan pengelolaan bencana terpadu, 3. instrumen perubahan sosial, 4. resolusi konflik, 5. pengendalian perencanaan tata guna lahan dan perlindungan alam, dan 6. pengalihan dan

⁸ Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. 78.

pengelolaan data dan informasi dalam penelitian ini difokuskan pada alat manajemen instrumen perubahan sosial.⁹

Kerusakan lingkungan semakin hari semakin terlihat begitu jelas, Perlu kita memikirkan upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki lingkungan kita agar terciptanya ketertiban, kebersihan dan keindahan. Langkah awal melakukan perbaikan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kita baru dilingkungan nasional.

Menurut Ramli upaya-upaya pencegahan ancaman alam dapat dilakukan dengan :¹⁰

1. Membuat Pos Peringatan Bencana. Salah satu upaya yang kemudian dapat di upayakan adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana, pos inilah yang nantinya menentukan warga masyarakat bisa kembali mempunyai tempat tinggalnya atau tidak.
2. Membiasakan hidup tertib dan disiplin. Perlu pola hidup tertib, yaitu dengan menegakan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Asal masyarakat

mentaatinya, berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan masyarakat juga harus disiplin.

3. Memberikan Pendidikan tentang Lingkungan Hidup. Pendidikan tentang Lingkungan Hidup sebagai bagian dari pendidikan resiko yang menjadi akibat dari bencana alam. Mulai antisipasi dengan perencanaan, mengatur sumber daya, mempelajari dampak. Edukasi mengurangi beban bencana dan upaya menerapkan rencana dan memantau progress demi rehabilitasi kembali.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai sumber ilmiah.¹¹ Teknik pengumpulan data yang peneliti

⁹ *Ibid*

¹⁰ Soehatman Ramli. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja*. (Jakarta : Dian Rakyat, 2010), hlm. 56.

¹¹ Moleong, Lexy,J., 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya). hal.3.

lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan Subjek Penelitian adalah para informan yang terkait dalam bidang tugasnya masing-masing. Para Informan tersebut adalah : (1) Komandan Yonif 303/SSM, (2) Kepala BAPPEDA, (3) Pimpinan BPBD Kabupaten Garut, (4) Perwakilan Prajurit yang terjun langsung dalam penanggulangan bencana Alam di Kabupaten Garut, (5) Tokoh Masyarakat. Objek dalam penelitian ini yaitu wilayah yang ada di Kabupaten Garut.

Pembahasan

Enabling Environment

Memiliki makna bahwa dalam penanggulangan bencana yang efektif perlu adanya dukungan dari seperangkat aturan, peraturan, prosedur dan kondisi yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat berjalan tanpa melanggar hukum. Namun dalam pelaksanaannya, selain terdapat institusi formal yang mengambil peran dalam penanggulangan bencana juga membuka kesempatan kepada masyarakat dan lembaga swasta lain untuk berperan serta. Dengan demikian, *enabling environment* merupakan lingkungan yang saling mendukung terdiri dari seperangkat kondisi yang saling berkaitan dan bersama-sama

menyediakan kemudian memfasilitasi kelancaran penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Garut.

BPBD Kabupaten Garut selalu melibatkan organ-organ yang tergabung di dalam sistem penanggulangan bencana, seperti dinas sosial, TNI-Polri, Tagana, SAR Daerah, Pramuka, PMI dan juga masyarakat di setiap tahapan penanggulangan bencana. Untuk mengukur pengkoordinasian peneliti mengukur dengan 3 hal substansi/prinsip yaitu : kebijakan, kerangka kerja legislatif, dan finansial.

a) Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan dapat juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting suatu instansi/organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemeliharannya berdasarkan dampaknya. Dalam hal ini kebijakan merupakan hal yang paling utama untuk dijadikan pedoman dasar dalam penanggulangan bencana alam agar permasalahan yang sering terjadi di kabupaten Garut dengan mengacu

terhadap kebijakan yang telah ditentukan maka dapat meminimalisir bencana alam itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan tentang penanggulangan bencana alam di Kabupaten Garut masih lemah walaupun telah diatur dalam rencana Tata Ruang Kabupaten Garut karena pihak pemerintah Kabupaten garut sendiri mengakui masih adanya kendala dalam meminimalisir alih fungsi lahan terutama lahan milik masyarakat yang di alih fungsikan. Terlihat jelas bahwa sering terjadinya bencana alam di Kabupaten Garut disisi lain dipengaruhi oleh lemahnya kesadaran masyarakat akan pemeliharaan wilayahnya, selain itu pihak pemerintah kurang tegas dalam pemberian peringatan terhadap masyarakat akan bahaya adanya bencana alam jika lahan yang dimiliki di alih fungsikan tidak sesuai peruntukannya. Adapun data pendukung alih fungsi lahan yang ditandai dengan adanya usaha pertambangan yang ditutup oleh Polda jawa Barat yang tidak memiliki izin usaha pertambangan terutama di

Kabupaten garut yang disinyalir merusak lingkungan yaitu:

Tabel 4.2 Data Usaha Pertambangan/Galian Pasir Ilegal di Kabupaten Garut

No.	Wilayah
1.	Blok Citiis Desa Pasawahan
2.	Blok Seureuh Jawa
3.	Legok Jambu Kelurahan Pananjung
4.	Blok Cilopang Desa Rancabogo

Sumber : Kompas 2017

Akibat dari penambangan illegal ini, Kabupaten Garut menderita kerugian yang cukup besar yang ditandai dengan pengaduan masyarakat karena adanya kerusakan lingkungan didaerah hutan lindung. Selain tidak berizin tambang-tambang pasir illegal tersebut berlangsung di Kaki Gunung Guntur dimana beroperasi di daerah rawan bencana yang mengakibatkan peristiwa banjir bandang yang menerjang sebagian wilayah Kabupaten Garut.

b) Kerangka Legislatif

Dalam sebuah Organisasi/ intansi atau lembaga tentunya langkah awal yang harus dimiliki yaitu adanya suatu kerangka legislatif dalam menentukan tujuannya. Kerangka legislatif merupakan sebuah rencana kerja atau rencana strategis yang dirancang atau disusun sedemikian rupa dengan

tujuan yang jelas yang telah ditentukan dan di sepakati bersama untuk pencapaian suatu tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa belum adanya kerangka legislatif/rencana kerja yang jelas yang mengatur pedoman tentang penanggulangan bencana alam di Kabupaten Garut dengan Yonif Raider 303/SSM hanya permintaan bantuan masih dilayangkan kepada KOREM 062/TN selaku unsur Aparatur TNI kewilayahan yang ada di Kab.Garut. Akan tetapi peranan Yonif raider 303/SSM sangat diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten garut dalam penanggulangan bencana alam, begitupun pernyataan dari pihak Yonif Raider 303/SSM sejauh ini untuk penanggulangan bencana alam di Kabupaten Garut hanya berdasarkan perintah dari satuan atas yaitu dari Brigif Raider 13/Galuh. Dengan demikian penanggulangan bencana alam di Kabupaten Garut masih belum Optimal karena belum adanya kerangka legislatif/kerangka kerja dan kerjasama yang jelas dengan berbagai pihak khususnya dengan Yonif raider 303/SSM walaupun bencana alam sifatnya tidak dapat diprediksi dengan

pasti akan tetapi dengan adanya kerangka legislatif/kerangka kerja dan kerjasama yang diatur setidaknya meminimalisir dan mengantisipasi adanya bencana alam.

Dengan tidak adanya kerangka legislatif/kerangka kerja yang jelas maka dalam evakuasi bagi prajurit Yonif Raider 303/SSM menjadi kendala sehingga mengakibatkan berita pencarian korban orang hilang kurang jelas, walaupun tidak menjadi faktor utama dalam evakuasi. Selain itu pada saat observasi di lapangan dalam penanggulangan bencana alam di kabupaten Garut tepatnya di Cikajang pada saat Banjir Bandang tahun 2016 dalam evakuasi korban dan pada saat ditemukan korban orang hilang ketika ditemukan oleh organisasi/lembaga dan relawan pihak dari masyarakat yang membantu evakuasi kadangkala ada langsung pihak keluarga korban tanpa dilaporkan langsung dan pihak keluarga korban meminta jasadnya langsung diberkan tanpa di data dengan jelas terlebih dahulu. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kerangka kerja yang jelas yang mengatur tentang penanggulangan bencana alam di Kabupaten garut itu sendiri.

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal maka pengkoordinasian sangatlah penting baik itu suatu kebijakan ataupun kerangka legislatif yang mengatur.

c) *Finansial*

Finansial dalam sebuah lembaga/intansi sering diartikan sebagai pengelolaan keuangan, dalam penanggulangan bencana alam perlu kita ketahui bahwa alur pengelolaan keuangan seperti apa dan bagaimana.

Pengelolaan Keuangan Dana Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Garut selama ini tidak ada kendala karena adanya Pos Dana Keuangan Tak Terduga yang digunakan untuk kebutuhan penanggulangan bencana alam dan juga juga realisasi anggaran dana keuangan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Garut tidak ada kendala karena mengingat tingginya kemungkinan bencana alam di kabupaten Garut dan sudah menjadi skala prioritas yang cukup tinggi dalam menyiapkan kemampuan BPBD dalam pencegahan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Garut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini tidak mengganggu

karena memang Pemerintah Kabupaten Garut telah menganggarkan dana baik untuk kegiatan operasional BPBD Garut maupun Pos Biaya tak terduga untuk penanganan akibat bencana alam.

Penanggulangan Banjir dan tanah longsor oleh Yonif Raider 303/SSM guna mewujudkan ketahanan wilayah di kabupaten Garut melalui pendekatan Enabling Environmen, yang ditinjau dari 3 indikator, Indikator Kebijakan menunjukan masiha lemah karena masih adanya kendala dalam meminimalisir alih fungsi lahan terutama lahan milik masyarakat, indikator kerangka legislatif/rencana kerja yang jelas yang mengatur pedoman tentang penanggulangan bencana alam di Kabupaten Garut dengan Yonif Raider 303/SSM hanya permintaan bantuan masih dilayangkan kepada KOREM 062/TN selaku unsur Aparatur TNI kewilayahan yang ada di Kabupaten Garut dan Indikator Finansial/Pengelolaan Keuangan menunjukan selama ini tidak ada kendala karena adanya Pos Dana Keuangan Tak Terduga yang digunakan untuk kebutuhan penanggulangan bencana alam di Kabupaten garut.

Peran Institusi

Institutional Role atau peran institusi merupakan kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama, seperti sudah disebutkan bahwa pengelolaan bencana adalah kompleks dan saling ketergantungannya sangat tinggi, maka dalam kelembagaan perlu dibuat organisasi lintas batas, baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Dengan demikian dalam pengelolaan penanggulangan bencana alam tentunya dibutuhkan peran institusi yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bersama, hal ini sejalan dengan masalah yang sering terjadi di Kabupaten Garut yaitu daerah rawan bencana. Dalam hal ini untuk dapat mengukur *Institutional role*/peran Institusi yaitu dengan Organisasi Lintas Batas.

Organisasi Lintas batas adalah Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama atau suatu organisasi luar instansi pemerintahan yang membantu dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Garut seperti Relawan atau Komunitas-komunitas Masyarakat ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam penanganan bencana alam di Kabupaten Garut banyak sekali organisasi kemanusiaan selain instansi

pemerintah yang membantu pada saat evakuasi ketika adanya bencana alam di Kabupaten Garut dan sejauh ini selalu di Komandani oleh pihak unsur dari TNI. Akan tetapi pada saat Mitigasi belum ada lembaga yang berpartisipasi hanya dari pihak BPBD kabupaten garut. Maka dari pernyataan tersebut bahwa pihak BPBD Kabupaten Garut perlu bantuan dari Organisasi Lintas Batas atau Unsur TNI untuk kegiatan Mitigasi.

Penanggulangan Banjir dan tanah longsor oleh Yonif Raider 303/SSM guna mewujudkan ketahanan wilayah di kabupaten Garut melalui pendekatan *Institutional role* yang ditinjau dari Organisasi Lintas Batas menunjukkan banyak sekali organisasi kemanusiaan selain instansi pemerintah yang membantu pada saat evakuasi ketika adanya bencana alam di Kabupaten Garut dan sejauh ini selalu di Komandani oleh pihak unsur dari TNI.

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Garut tidak hanya dilakukan oleh BPBD Kabupaten Garut melainkan juga organ-organ yang tergabung di dalam sistem penanggulangan bencana, seperti dinas sosial, TNI-Polri, Tagana, SAR Daerah, Pramuka, PMI dan juga masyarakat.

Alat-alat Manajemen

Alat-alat manajemen bencana alam yang dimaksud yaitu analisis penilaian bencana, permodelan dalam pengelolaan bencana terpadu meliputi Perancangan Pengelolaan Bencana Terpadu dan Instrumen Perubahan Sosial melalui Pendidikan dan pelatihan, komunikasi dengan para pihak dan peningkatan kepedulian publik, resolusi konflik, pengendalian perencanaan tata guna lahan dan perlindungan alam serta pengalihan, pengelolaan data dan informasi.

Diharapkan dengan adanya pengetahuan dalam melakukan penyelamatan kepada korban maka :

a. Menghindari kerugian pada individu, masyarakat dan Negara melalui tindakan dini. Tindakan ini merupakan pencegahan, tindakan ini efektif sebelum bencana itu terjadi. Tindakan penghindaran biasanya dikaitkan dengan beberapa upaya. Pertama penghilangan kemungkinan sebab. Kalau bencana itu bisa disebabkan oleh kesalahan manusia, tindakan penghilangan sebab tentunya bisa dilakukan. Tentunya hal ini akan sulit bila penyebabnya adalah alam yang memiliki energi di luar kemampuan manusia untuk

melakukannya. Pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan gempa bumi tektonik, misalnya, merupakan sebab yang sampai saat ini belum diatasi manusia. Oleh karena itu tindakan penghindaran bencana alam lebih diarahkan pada menghilangkan, atau mengurangi kondisi yang dapat menimbulkan bencana. Kondisi dimaksud adalah struktur bangunan yang sesuai untuk kondisi gempa yang dapat bangunan tahan terhadap guncangan, sehingga dapat menghindari kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan.

b. Meminimalisasi kerugian pada individu, masyarakat dan Negara berupa kerugian yang berkaitan dengan orang, fisik, ekonomi, dan lingkungan bila bencana tersebut terjadi, serta efektif bila bencana itu telah terjadi. Tetapi perlu diingat, piranti tindakan meminimalisasi kerugian itu telah dilakukan jauh sebelum bencana itu terjadi. Contoh bencana alam dengan cepat akan menimbulkan masalah pada kesehatan akibat luka parah, bahkan meninggal, maka tindakan minimalisasi yang harus dilakukan sejak dini adalah penyebaran pusat-pusat medis ke berbagai wilayah, paling tidak sampai tingkat kecamatan.

c. Meminimalisasi penderitaan yang ditanggung oleh individu dan masyarakat yang terkena bencana. Ada juga yang menyebut tindakan ini sebagai pengentasan. Tujuan utamanya adalah membantu individu dan masyarakat yang terkena bencana supaya dapat bertahan hidup dengan cara melepaskan penderitaan yang langsung dialami. Bantuan tenda, pembangunan kembali perumahan yang hancur, memberi subsidi, termasuk kedalam kategori ini. Pemberian pemulihan kondisi psikis individu dan masyarakat yang terkena bencana juga perlu karena bertujuan untuk mengembalikan optimisme dan kepercayaan diri.

d. Untuk memperbaiki kondisi sehingga individu dan masyarakat dapat mengatasi permasalahan akibat bencana. Perbaikan kondisi terutama diarahkan kepada perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, penyediaan air bersih, sarana komunikasi, dan sebagainya.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Bencana pada Bab I, Pasal 4 mengatur bahwa Standar kemampuan personel TNI yang

tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana harus memiliki kemampuan/keterampilan penanggulangan bencana serta sertifikasi pencarian dan pertolongan korban.

Yonif 303/Setia Sampai Mati memang tidak selalu disertakan dalam setiap adanya latihan dan pendidikan bersama baik secara internal dalam kesatuan maupun secara eksternal dengan BPBD, Dinkes, Dinsos maupun instansi lain, namun sejauh ini Yonif 303/Setia Sampai Mati senantiasa dilibatkan dalam pencarian korban bencana. Pengerahan prajurit Yonif 303/Setia Sampai Mati dianggap diperlukan karena kearutannya mampu memanfaatkan kekuatan dan keahliannya dalam mencari korban bencana. Namun demikian ketika melaksanakan tugas adakalanya terbentur dengan keakuratan data antara setiap instansi, seperti informasi korban yang telah diketemukan kadang kala tidak dilakukan pemutakhiran data secara bersamaan.

Konsistensi dan partisipasi masyarakat melalui Tagana harus terus terjaga dengan mengikutsertakan Tagana dalam berbagai tahapan penanggulangan bencana terutama pada proses mitigasi bencana. Hal ini penting, mengingat Tagana merupakan salah satu elemen

masyarakat yang berperan dalam penanggulangan bencana yang diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus mampu menyiapkan program untuk dapat meningkatkan peran Tagana dalam tahapan penanggulangan bencana sehingga menjadi poin penting menjaga ketahanan daerah khususnya dalam manajemen penanggulangan bencana. Tidak tertutup kemungkinan ada kerjasama “segitiga” antara pemerintah daerah, lembaga filantropi dan Tagana untuk membangun peran masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Tahapan penanggulangan bencana dengan memfokuskan kajian pada kebijakan, kerangka kerja legislatif, dan finansial merupakan bagian dari upaya upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, sesudah bencana. Pernyataan ini diperkuat oleh Sudibyakto (1997) menjelaskan bahwa pengelolaan kebencanaan merupakan sistem pengelolaan bencana alam merupakan kebutuhan nasional yang bersifat sinambung baik bagi pemerintah maupun

masyarakat berkaitan dengan adanya bencana alam. Sistem pengelolaan kebencanaan merupakan siklus yang terdiri dari rangkaian kegiatan yaitu kejadian bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya, kemudian terjadi bencana kembali dan seterusnya.¹²

Kendala Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Berdasarkan beberapa kali kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Garut maka dapat disusun yang menjadi kendala dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor, sebagai berikut:

1. Perkembangan Kabupaten Garut yang semakin pesat memberikan dampak pada peningkatan kebutuhan lahan untuk sarana permukiman dan beraktivitas lainnya. Hal ini mendorong berkembangnya aktivitas pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya sebagai kawasan permukiman. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dan tingginya intensitas

¹² Sudibyakto. Manajemen Bencana Alam dengan Pendekatan Multidisiplin: Studi Kasus Bencana Gunung Merapi. *Majalah Geografi Indonesia* 12 (22), 1997) hlm. 31-41.

aktifitas manusia dalam mengubah tata guna lahan akan mempertinggi tingkat resiko pada daerah rawan bencana tanah. Keadaan ini terus saja berlangsung karena rendahnya tingkat kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah di samping lemahnya implementasi kebijakan terhadap pengawasan pembangunan dan perkembangan permukiman di kawasan yang tidak sesuai. Pemerintah Kabupaten Garut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah berupaya membatasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana terhadap kegiatan budidaya lahan permukiman. Dalam RTRW yang telah disusun tersebut dinyatakan bahwa daerah rawan bencana difungsikan sebagai kawasan lindung. Namun kenyataannya, masih ada pemanfaatan lahan sebagai kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan pemerintah daerah belum dapat menerapkan kebijakan tersebut secara optimal, hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk sudah lama bermukim di daerah rawan bencana bahkan sudah ada yang turun-temurun. Untuk itulah diperlukan evaluasi kesesuaian lahan permukiman pada daerah rawan bencana di

Kabupaten Magelang agar dapat diketahui persebaran permukiman pada lahan yang tidak sesuai terutama pada daerah rawan bencana agar resiko bencana alam yang terjadi di Kabupaten Garut dapat diminimalisir. Selain itu, evaluasi ini juga dapat dijadikan acuan dalam mitigasi kesiapsiagaan bencana pada permukiman di daerah yang rawan bencana agar tidak mengakibatkan kerugian yang besar.

2. Kesadaran dan kepedulian akan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat baru menjadi penting dalam penanganan bencana setelah terjadi bencana. Pengalaman ini mengajarkan bahwa masyarakat mutlak dan harus terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan mengantisipasi bencana. Ketika terjadi banjir dan tanah longsor, hampir seluruh instansi yang berwenang mengatur dan memberikan bantuan terhadap korban di Kabupaten Garut. Bantuan dari luar daerah juga tidak segera tiba, mengalami hambatan karena rusaknya infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, dan pelabuhan. Banyak korban yang tidak dapat diselamatkan karena kurang dan lambatnya pertolongan. Dengan segala keterbatasan yang ada, korban

bencana terpaksa berupaya sendiri agar dapat bertahan hidup. Dalam beberapa kasus bencana, sebagian anggota masyarakat, karena kondisi psikologis dan kepanikannya, tidak berinisiatif melakukan tindakan yang dapat menyelamatkan dan membantu korban. Sebagian lagi tidak membantu karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada juga anggota masyarakat yang berupaya membantu korban, tetapi karena ketidak-tahuan, malahan menambah beban korban. Ketika mengangkat korban yang patah tulang, misalnya, karena tidak tahu menjadi salah angkat sehingga kondisi korban semakin parah. Oleh karena itu masyarakat perlu mendapat keterampilan teknik-teknik sederhana agar dapat memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana. Masyarakat di daerah rawan bencana, bersama-sama dengan pihak yang berwenang, menjadi "subjek'atau pelaku. Salah satu bentuk partisipasi pada lingkup yang paling kecil adalah kesiapsiagaan diri dan keluarga masing-masing, sedangkan pada lingkungan yang lebih luas mencakup

komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat.

Penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan Sri Harini bahwa pelibatan masyarakat secara aktif dalam mengelola hal hal yang berkaitan dengan bencana ini dikenal dengan manajemen bencana berbasis masyarakat.¹³ Implementasi manajemen bencana berbasis masyarakat juga merupakan salah satu pilar penting guna mensukseskan program pendidikan kebencanaan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, akan menambah pengalaman, pemahaman, ketrampilan, kepedulian, sekaligus membangun kesadaran mereka dalam merespon hal-hal yang berkait dengan kebencanaan.

3. Belum ada sinergi dan koordinasi antara instansi yang terlibat dalam aksi tanggap bencana. Selama ini, Yonif Raider 303/SSM bergerak sendiri dalam menangani bencana. BPBD Kabupaten Garut, sebagai pusat komando belum secara maksimal mensinergikan potensi instansi. Yonif Raider 303/SSM memiliki kelebihan di antaranya: memiliki jaringan sumber daya manusia

¹³ Sri Harini: Membangun Masyarakat Sadar Bencana, JURNAL DAKWAH, Vol. XI No. 2, Juli-Desember 2010, hal. 165-166

yang besar, memiliki akses ke masyarakat yang efektif, dan memiliki pengetahuan tentang kondisi sosial masyarakat yang ditimpa bencana. BPBD Kabupaten Garut perlu membuat modul acuan penanganan bencana bagi para seluruh instansi dimana modul itu tidak hanya berisi soal teknis keterampilan tapi juga soal bagaimana membangun koordinasi, membagi tugas, dan mendistribusikan bantuan secara efektif kepada korban bencana di lapangan.

Upaya Peningkatan Kemampuan Yonif Raider 303/SSM

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Bencana pada Bab I, Pasal 5, ayat 1 dan 2, sebagai berikut:

1. Kemampuan/keterampilan penanggulangan bencana serta pencarian dan pertolongan korban personel tingkat daerah, dapat diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan pada lembaga pendidikan TNI di daerah berkerjasama dengan BPBD.
2. Dalam hal belum terpenuhinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

TNI dapat menyelenggarakan latihan di satuan dengan memanfaatkan personel yang telah mengikuti pendidikan dan latihan penanggulangan bencana.

Menyelaraskan aturan PP di atas dan kebutuhan dari perbantuan yang harus diberikan oleh Yonif Raider 303/SSM maka dapat disusun upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan prajurit

Dengan melaksanakan latihan kemampuan dasar penyelamatan korban bencana alam. Gelar latihan peningkatan kemampuan prajurit bertujuan untuk melihat kesiapan anggota dan kondisi alat dalam menghadapi kondisi geografis dan curah hujan cukup tinggi jika terjadi musim penghujan di wilayah Kabupaten Garut yang berpotensi terjadinya bencana alam. Dengan demikian diharapkan dengan adanya gelar kegiatan, prajurit paham bagaimana perannya dalam penanganan korban bencana. Selain cara bertindak, prajurit harus paham alat-alat yang akan digunakan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan efektif.

Pentingnya latihan bersama secara menyeluruh dengan semua

instansi yang terkait bagi semua prajurit yang dipekerjakan pada misi pencarian dan penyelamatan benar-benar sangat penting.. Kegagalan satu mata rantai dalam rangkaian yang sering kali bersifat kompleks dari tindakan yang diperlukan dalam misi pencarian dan penyelamatan dapat membahayakan keberhasilan operasi, yang mengakibatkan hilangnya nyawa personel pencarian dan penyelamatan, kehidupan orang-orang yang mungkin dapat diselamatkan dan/atau hilangnya sumber daya yang berharga. Tujuan pelatihan adalah untuk memenuhi tujuan sistem pencarian dan penyelamatan dengan mengembangkan spesialis pencarian dan penyelamatan. Karena pengalaman dan penilaian yang luas diperlukan untuk menangani situasi, keterampilan yang diperlukan membutuhkan waktu yang signifikan untuk dikuasai.

Pengembangan wawasan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan di atas merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi dimana memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam pencapaian tujuan

organisasi. Pengembangan diri berkaitan dengan wawasan kebencanaan dapat dilakukan dengan pengembangan secara informal dan nonformal seperti yang diungkapkan oleh pengembangan informal merupakan pengembangan yang dilakukan atas keinginan serta usaha sendiri melatih dan mengembangkan diri. Pengembangan informal dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan *literature* yang ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatannya. Serta Pengembangan secara formal merupakan cara pengembangan yang dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan latihan, baik itu pendidikan dan latihan yang diadakan oleh instansi itu sendiri ataupun dengan mengirimkan ke instansi lain.¹⁴

2. Meningkatkan kebutuhan wawasan dan pengetahuan kebencanaan Mengacu kepada pengalaman dari Yonif Raider 303/SSM yang dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban bencana alam perlu

¹⁴ Diah Wulansari, Awang Darumurti dan Dwian Hartomi Akta Padma Eldo. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Bencana. Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Journal of Governance And Public Policy* Vol. 4 No. 3 Oktober 2017.

ditunjang dengan latihan *Urban Search and Rescue* (USAR).

Latihan USAR memiliki prioritas dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil, perencanaan dan bagaimana respon yang dibutuhkan dalam situasi penanggulangan pencarian korban bencana alam. Dengan mengikuti latihan ini, prajurit akan memperoleh banyak pengetahuan mengenai penanggulangan pencarian korban bencana alam yang melalui pelatihan-pelatihan khusus dan saling berbagi informasi serta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para personel di lapangan. Latihan USAR bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolektif prajurit untuk merencanakan dan mempersiapkan dalam penanggulangan bencana alam khususnya dalam pencarian korban.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada kajian penelitian ini, maka dapat disusun kesimpulan berkaitan dengan penanganan tingkat kerawanan yang dilaksanakan oleh Yonif Raider 303/SSM

1. Peran Yonif Raider 303/SSM sebagai bagian dari satuan Non Kowil melaksanakan tugas dalam

penanggulangan bencana yaitu guna memenuhi kewajiban Binter Non Kowil untuk membantu terwujudnya kemanunggalan TNI dan Rakyat dilingkungan sekitar yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI. Keikutsertaan Yonif Raider 303/SSM dikhususkan dalam hal pencarian dan penyelamatan korban bencana alam pada tahap tanggap darurat. Dimana pada saat melaksanakan tugas, prajurit berpedoman pada juknis yang disempurnakan dengan berdasar kepada instruksi dari pimpinan dan kebutuhan wilayah yang terkena banjir tersebut.

2. Kendala yang dihadapi dalam penanganan tingkat kerawanan bencana Satuan Non Kowil Yonif Raider 303 selama penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Garut yaitu tidak jelasnya kerangka kerja dalam evakuasi bagi prajurit Yonif Raider 303/SSM, alat utama dalam melaksanakan pencarian korban bencana alam dan sistem manajemen operasional penanggulangan bencana di lapangan belum berjalan secara efektif. Belum adanya koordinasi yang solid berkaitan

dengan instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana, hal lain yang menjadi kendala dalam pemberian bantuan yaitu kurang akuratnya pemutakhiran data berkaitan dengan korban bencana maupun wilayah yang masih rentan terkena bencana.

3. Peningkatan kemampuan Yonif Raider 303/SSM dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Garut dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan prajurit yaitu dengan mengadakan gelar latihan bersama dengan demikian dapat diketahui kesiapan prajurit dan kesiapan materiil yang akan digunakan jika bencana banjir dan tanah longsor datang. Alternatif berikutnya yaitu dengan meningkatkan kebutuhan wawasan dan pengetahuan kebencanaan, dimana prajurit Yonif Raider 303/SSM mendapatkan kesempatan untuk mengetahui keahlian dan wawasan berkaitan dengan kebencanaan disesuaikan dengan keadaan geografi dan bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Garut.

Rekomendasi

Selanjutnya, Penulis menyusun rekomendasi dalam penanganan tingkat kerawanan yang dilaksanakan oleh Yonif Raider 303/SSM

1. Perlu adanya pengoptimalisasian terhadap peningkatan partisipasi masyarakat melalui Binter yang dilaksanakan Yonif Raider 303/SSM dengan mensosialisasikan kemampuan yang tidak hanya berkisar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana namun juga pada tahap prabencana. Melalui ketersediaan dana yang memadai dapat meningkatkan program-program untuk melatih prajurit agar dapat mengurangi dampak bencana alam.
2. Perlunya Revitalisasi kerjasama dalam pembuatan MoU antara Yonif Raider 303/SSM dengan Pemerintah Kabupaten Garut dalam bidang mitigasi bencana dengan demikian Yonif Raider 303/SSM dapat secara langsung memberikan bantuan kepada korban. Masyarakat perlu untuk mengetahui dan merasakan sendiri mengenai upaya dalam menangani bencana sehingga masyarakat mampu untuk menolong diri sendiri ketika bencana terjadi.

3. Bentuk mitigasi yang dapat diberikan Yonif Raider 303/SSM yaitu dengan melaksanakan pelatihan posko dengan melibatkan berbagai unsur yang ada di lingkungan Garut termasuk masyarakat.
4. Perlu adanya *Action Plan* terkait hal-hal teknis dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor oleh Yonif Raider 303/SSM guna mewujudkan ketahanan wilayah, maka diperlukan:
 - 1) Jaringan koordinasi terpadu antara Yonif raider 303/SSM dengan segenap instansi yang peduli terhadap bencana alam di daerah kabupaten garut, sebagai pedoman, baik formal maupun informal melalui personal interrelations.
 - 2) Perkuatan kontribusi Yonif Raider 303/SSM melalui program Binter, dalam memberdayakan potensi masyarakat sebagai collective power bagi ketahanan dan keutuhan suatu daerah.
 - 3) Upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan/pedoman penanggulangan bencana alam yang melibatkan unsur TNI AD.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramli, Soehetman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: Dian Rakyat
- J. Kodoatie, Robert dan Roestam Sjarief. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Edisi. Revisi*. Yogyakarta: Andi

Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Jurnal dan Artikel

- Sudibyakto. Manajemen Bencana Alam dengan Pendekatan Multidisiplin: Studi Kasus Bencana Gunung Merapi. *Majalah Geografi Indonesia* 12 (22), 1997) hlm. 31-41
- Sri Harini: Membangun Masyarakat Sadar Bencana, *JURNAL DAKWAH*, Vol. XI No. 2, Juli-Desember 2010, hal. 165-166
- Diah Wulansari, Awang Darumurti dan Dwian Hartomi Akta Padma Eldo. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Bencana. *Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Journal of Governance And Public Policy* Vol. 4 No. 3 Oktober 2017.

Website

- Ghani, Hakim. “18 Kecamatan di Garut Rawan Bencana Alam”, dalam

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3748432/18-kecamatan-di-garut-rawan-bencana-alam>, diakses pada 23 Mei 2018

Doni Ikbal, “*Memperhatikan ... Ternyata ini penyebab banjir bandang Garut*” dalam <http://www.mongabay.co.id/2016/09/23/memprihatinkan-ternyata-ini-penyebab-banjir-bandang-garut/>, diakses pada 23 Mei 2018

Sumiana, Yani. “Kajian Banjir Bandang Kabupaten Garut”, dalam <https://yanisumiana.wordpress.com/2017/03/29/kajian-banjir-bandang-kabupaten-garut/>, diakses pada 24 Mei 2018.